

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN DI PROVINSI NTT KEADAAN S/D
DESEMBER TAHUN 2023**

A. Pencapaian Kinerja DPMPSTSP Provinsi NTT s/d Bulan Desember Tahun 2023

Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP setiap Instansi Pemerintah (Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan SKPD) wajib menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pengumpulan data kinerja serta melakukan evaluasi kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Untuk mengukur Capaian Kinerja, yaitu dengan menggunakan formula apabila semakin tinggi realisasi

menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Perkembangan (\%)} = \frac{\text{Realisasi saat ini} - \text{Realisasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) Dlinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT Tahun 2023 Keadaan s/d Bulan
Desember

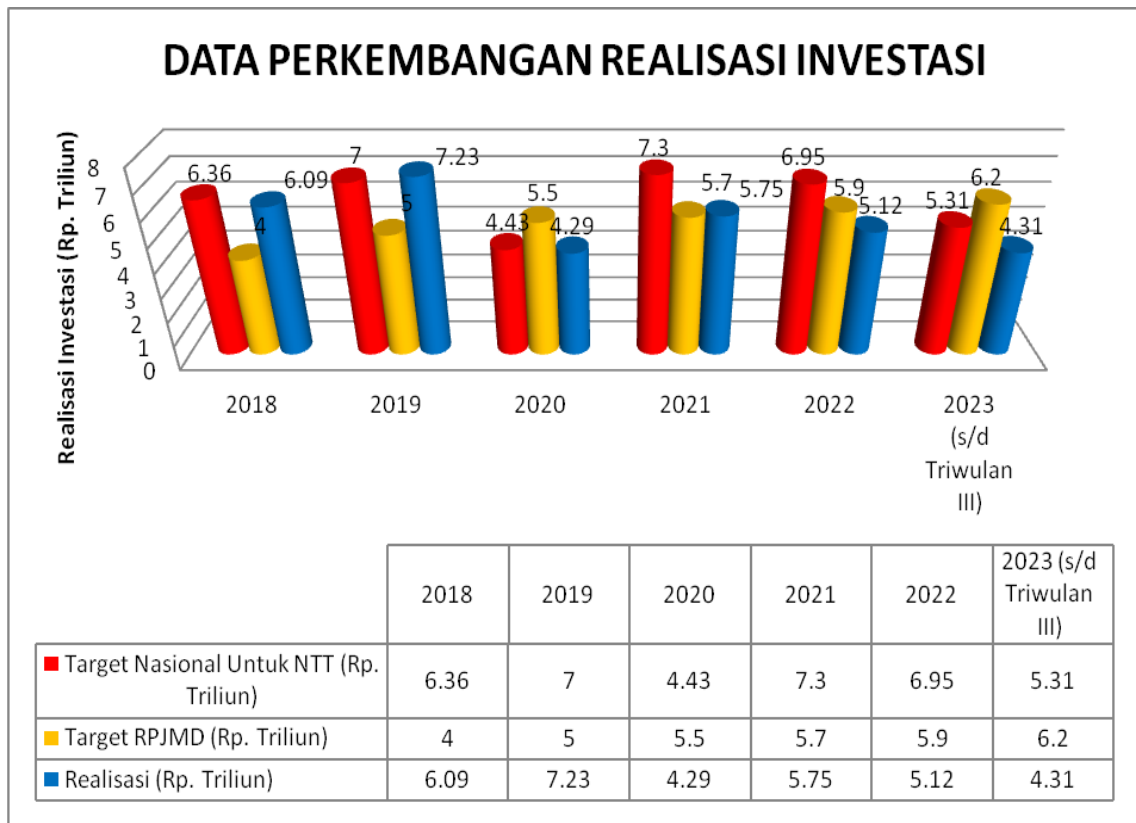
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1 Meningkatnya jumlah investor dan nilai realisasi investasi	1. Penambahan Nilai Realisasi Investasi	5,31 T	Rp. 4.313.900.000.000- (81,24%)	81,24%
	2. Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun. Target PMA : Rp. 2.124.000.000.000 atau 40% dan Target PMDN : Rp. 3.186.000.000.000 atau 60%)	100 % (Target PMA : Rp. 2.124.000.000.000 atau 40% dan Target PMDN : Rp. 3.186.000.000.000 atau 60%)	PMA (Rp. 1.682.000.000.000,- (79,19%) & PMDN (Rp. 2.631.900.000.000 (82,61%)	PMA : 79,19% dan PMDN 82,61%
2 Terwujudnya kepuasan pelayanan publik	3. Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100% (5.000 Izin)	7.703 Izin	154,06
	4. Nilai indeks kepuasan masyarakat meningkat	93	95	102,15%

Catatan : Data realisasi investasi data sementara masih menunggu publikasi resmi BKPM RI untuk data Triwulan IV.

Pencapaian Kinerja Masing-Masing Indikator, adalah sebagaimana diuraikan secara rinci sebagai berikut :

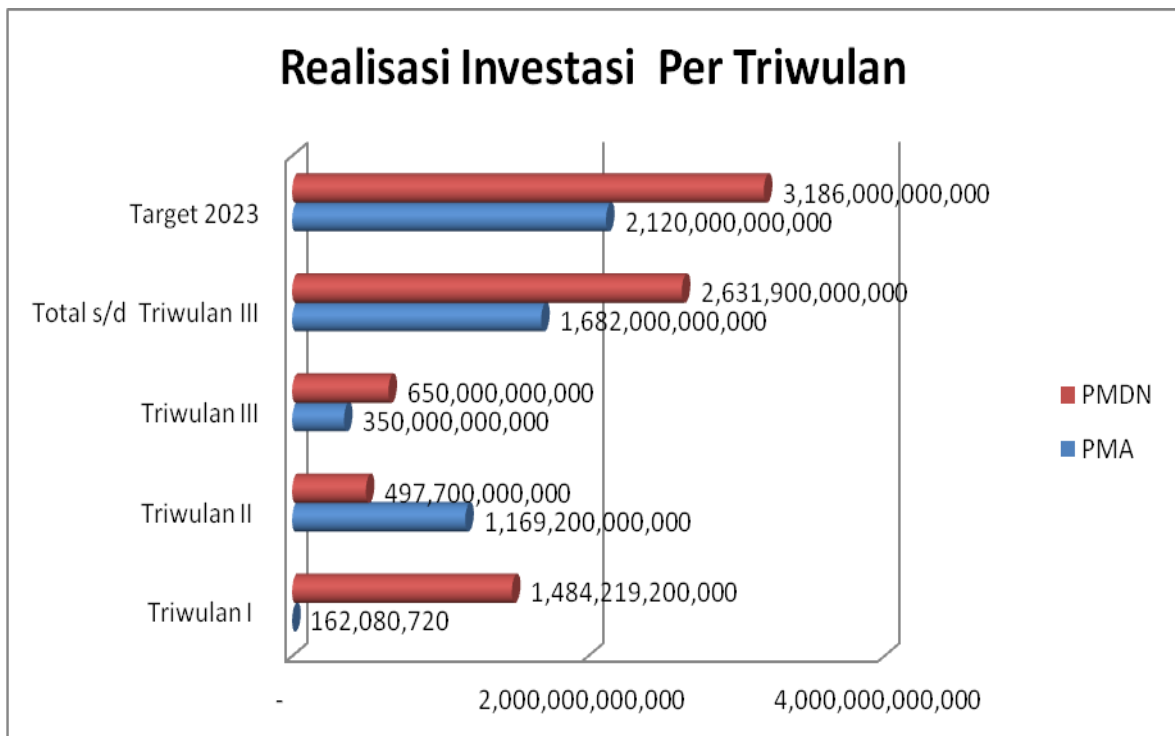
1. Capaian Indikator Kinerja Penambahan Nilai Realisasi Investasi . Target yang ingin dicapai tahun 2023 adalah 5, 31 Triliun. Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online, yang disampaikan oleh pelaku usaha melalui System OSS-RBA (LKPM Online). Realisasi investasi Tahun 2023 (s/d Triwulan III) adalah Rp. 4.313.900.000.000 (81,24%) dari target Nasional Rp. 5.310.000.000.000, dan 69,58% target RPJMD sebesar Rp. 6,2 Triliun. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.682.000.000.000 , dengan 340 proyek/kegiatan usaha dengan jumlah perusahaan PMA yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ada 431 perusahaan dan realisasi investasi PMDN : Rp. 1.981.900.000.000 dengan 1.507 proyek/kegiatan usaha dengan jumlah perusahaan PMDN yang menyampaikan LKPM ada 1.044 perusahaan. Data perkembangan realisasi investasi tahun 2018 – 2023,- Jadi capaian Kinerja 82,96 % atau melampaui Target Triwulan III Tahun 2023 sebesar 7,96%.

Gambar 1
Target dan Realisasi Investasi Tahun 2018 – 2023 (Data Sementara)

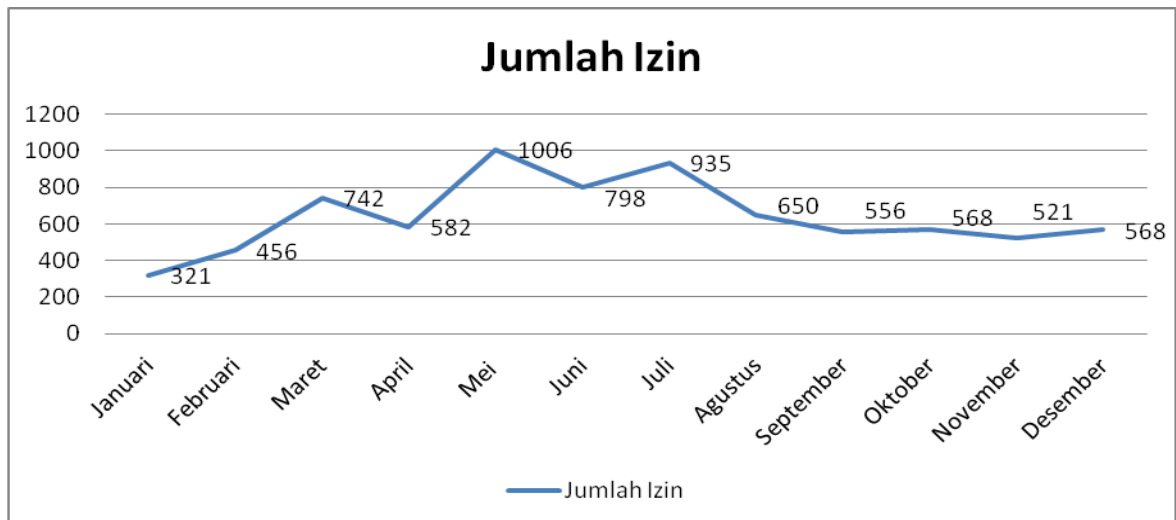


- 2. Capaian Indikator Kinerja : Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun.** Target Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Awal Rp. 5,2 Triliun kemudian dalam PK perubahan targetnya disesuaikan dengan target nasional sebesar Rp. 5.310.000.000 yang terdiri dari target realisasi investasi PMA : Rp. 2.124.000.000.000 (40%) dan Target realisasi investasi PMDN : Rp. 3.186.000.000.000 (60%). Realisasi Investasi Triwulan I sebesar Rp. 1.646.299.920,- (PMA : Rp. 162.080.720.000,- & PMDN : Rp. 1.484.219.200.000,-) dari 269 Pelaku Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja sebanyak 1.756 Tenaga Kerja yang terdiri dari 1.746 Tenaga Kerja Indonesia dan 10 Tenaga Kerja Asing. Untuk Triwulan II, Realisasi Investasi Triwulan II sebesar Rp. 1.667.600.080.000,- (PMA : Rp. 1.169.919.280.000,- & PMDN : Rp. 497.680.800.000,-); Untuk Triwulan III, Realisasi Investasi Rp. 1 Trilyun (PMA : Rp. 350.000.000.000 dan PMDN : Rp. 650.000.000.000) dengan jumlah proyek sebanyak 1.527 Proyek (PMA : 360 Proyek & PMDN : 1.167 Proyek). Realisasi Investasi

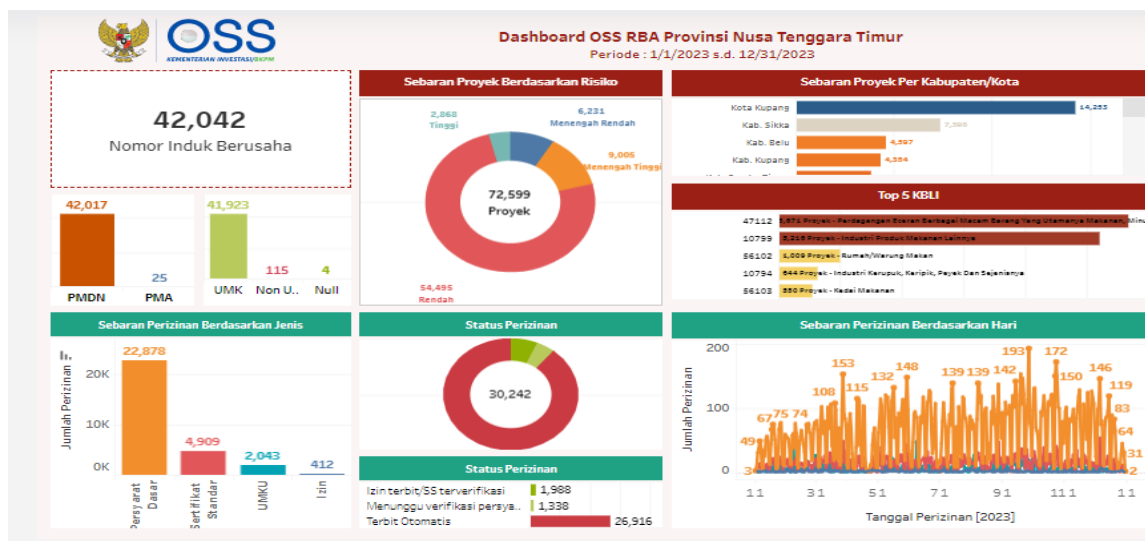
Penanaman Modal (PMA dan PMDN) sampai dengan Triwulan III, sebagaimana pada Gambar 2 berikut :



- 3. Capaian indikator kinerja : Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP.** Target 100 % dengan jumlah izin yang diterbitkan 5.000 izin. Realisasi jumlah izin yang diterbitkan s/d Bulan Desember 2023 sebanyak 7.703 izin atau 154,06% (yang diterbitkan secara off line (secara manual) pada unit layanan PTSP yang ada pada DPMPTSP Provinsi NTT. Rata-rata setiap bulan ada 642 izin yang diterbitkan dan perhari ada 29 ljin (22 hari kerja). Jadi capaian Indikator Jumlah Izin Yang Diterbitkan Tepat Waktu, adalah **154,06%**, Data perkembangan jumlah izin yang diterbitkan setiap bulan melalui Front Office DPMPTSP Provinsi NTT, sebagaimana pada Gambar 3 berikut :



Jumlah perizinan yang diterbitkan melalui System OSS RBA Tahun 2023 (Januari – Desember 2023) sebanyak 42.042 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NTT. Terdiri dari PMA : 25 (dua puluh lima) NIB; PMDN : 42.017 NIB (ada 41.923 UMK), dan Non UMK ada 115. Jumlah Sertifikat Standar yang diterbitkan sebanyak 4.909 dokumen, Persyaratan Dasar Perizinan (KKPR, PBG, Sertifikat Laik Fungsi Persetujuan Lingkungan berupa AMDAL/UKL/UPL) sebanyak 22.878 dokumen, dan jumlah Izin yang diterbitkan sebanyak 412 izin. Data realtime penerbitan izin melalui System **Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), Tahun 2023**, sebagaimana pada Gambar 4 berikut.



4. Capaian Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Target kinerja tahun 2023 sebesar 93 realisasinya sesuai hasil survey IKM Triwulan I : 91,25 atau capaian kinerjanya 98,11 %. Triwulan II ; 91,50 atau capaian Kinerjanya 98,38%. Sehingga untuk Semester I Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 91,37 atau Capaian Kinerja Semester I : 98,25%. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III : 92,11 (Sangat Baik), Triwulan IV nilai IKM : 95. Jadi capaian kinerja untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 95 atau 102,15%. Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dengan metode yaitu secara online melalui HP Android dengan menscan barcode yang ada serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) aspek, yaitu **persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, prilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan.**

B. Capaian Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Di Provinsi NTT

a) Capaian Kinerja Investasi Tahun 2018 – 2023 di Provinsi NTT

Secara Nasional Target realisasi Penanaman Modal (PMA + PMDN) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sangat optimis tentunya berdasarkan data potensi yang ada serta iklim investasi yang sangat kondusif , dengan berbagai kemudahan berusaha yang dapat menarik minat investor lebih banyak lagi ke Indonesia. Pada tahun 2018 target realisasi investasi sebesar Rp.792,5 Triliun yang terdiri dari PMA : 494,7 Triliun dan PMDN Rp. 297,8 Triliun, tahun 2021 : Rp. 991,3 Triliun dan tahun 2022 target realisasi investasi Indonesia sudah mencapai Rp 1.128,3 Triliun cukup besar. Realisasi investasi tahun 2018 Rp. 721,2 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 392,7 Triliun dan PMDN : Rp. 328,6 Triliun. Realisasi investasi tahun 2021 : Rp.

901 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 454 Triliun dan PMDN : Rp. 447 Triliun dan Tahun 2022 realisasi investasi Indonesia mencapai : Rp. 1.207,2 Triliun yang terdiri dari PMA : Rp. 654,4 Triliun dan PMDN : Rp. 544,9 Triliun dan tahun 2023 (s/d Triwulan III) Rp. 1.053 Triliun dari target Rp. 1.400 Triliun. Data perkembangan realisasi investasi Nasional Tahun 2018 – 2023, sebagaimana pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3

Data Perkembangan Realisasi Investasi Nasional Tahun 2017 – 2023
(Data Sementara)

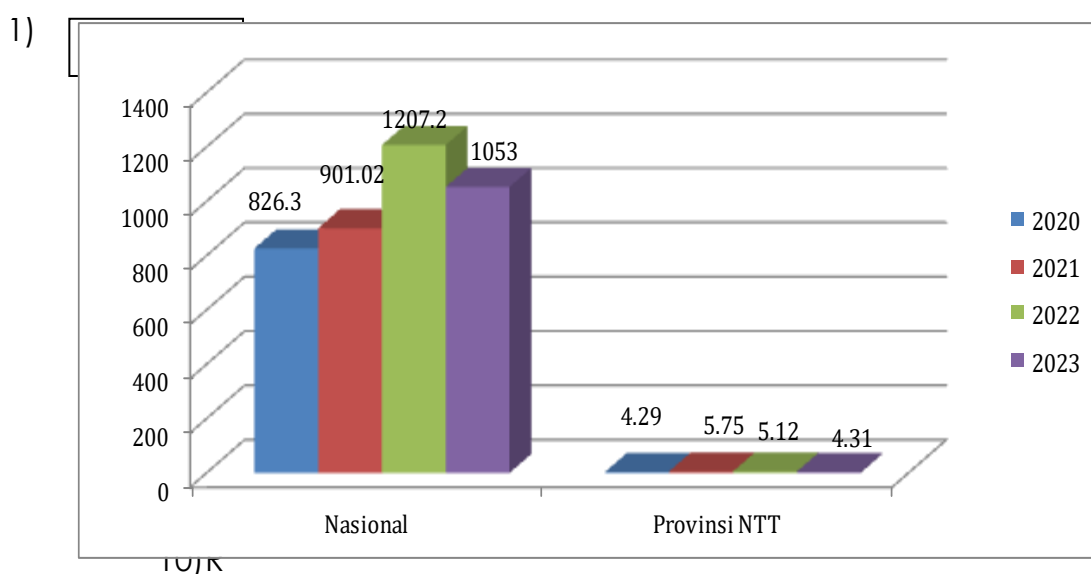
Tahun	Target Investasi Nasional		Jumlah (Rp.) Triliun	Realisasi Investasi		Jumlah (Rp.) Triliun
	PMA (Rp.) Triliun	PMDN (Rp.) Triliun		PMA (Rp.) Triliun	PMDN (Rp.) Triliun	
2017	429	249,8	678,8	430,5	262,3	692,8
2018	494,7	297,8	792,5	392,7	328,6	721,2
2019	569,9	361,0	913,9	423,1	386,5	809,6
2020	466,1	419,9	886,0	412,8	413,5	826,3
2021	517,5	473,8	991,3	454	447	901
2022	583,4	544,9	1.128,3	654,4	544,9	1.207,2
2023	800	600	1.400	559,6	493,5	1.053,1

Sedangkan perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2017 s/d 2022 setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal). Realisasi investasi di Provinsi NTT Tahun 2018 : Rp. **6.091.114.003.704,41**, tahun **2019 : Rp. 7.231.992.616.871,30**, tahun **2020 : Rp. 4.292.054.576.669,89** (mengalami penurunan cukup signifikan dampak covid 19), realisasi investasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi Rp. **5.749.168.250.996 (dampak covid masih ada)**, realisasi investasi tahun 2022 : 2022 : Rp. 5.124.140.000.000. Rata-rata peningkatan atau penambahan nilai realisasi investasi di Provinsi NTT periode tahun 2018 – 2022 mencapai **7,6%**. Realisasi investasi Tahun 2023 (s/d Triwulan III) adalah Rp. 4.313.900.000.000 (81,24%) **dari target Nasional Rp. 5.310.000.000.000**. Perbandingan realisasi investasi Nasional dngan Provinsi NTT untuk 4 (empat) tahun terakhir, yaitu Provinsi NTT memberikan kontribusi terhadap pencapaian

realisasi investasi Nasional Tahun 2020 sebesar 0,52% Tahun 2021 sebesar 0,64% dan untuk tahun 2022 sebesar 0,42% dan tahun 2023 sebesar 0,42%. Berdasarkan data yang ada kontribusi realisasi instansi daerah Provinsi NTT terhadap pencapaian realisasi investasi secara Nasional masih sangat kecil. Sementara di lain sisi setiap tahun Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM RI memberikan dukungan alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan DAK Non Fisik untuk melakukan Pembinaan, Peningkatan SDM, fasilitasi penyelesaian masalah investasi dan Pengawasan terhadap perusahaan PMA dan PMDN kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota melalui DPMPSTSP Provinsi NTT . Data perbandingan realisasi investasi secara Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 sebagaimana pada Gambar 5 berikut ini.

Gambar 5

Data Perbandingan Realisasi Investasi Nasional dan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2022.



Sedangkan perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2017 s/d 2022 setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal). Realisasi investasi di Provinsi NTT Tahun 2018 : Rp. **6.091.114.003.704,41**, tahun 2019 : Rp. **7.231.992.616.871,30**, tahun 2020 : Rp. 4.292.054.576.669,89 (mengalami

penurunan cukup signifikan dampak covid 19), realisasi investasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi Rp. **5.749.168.250.996 (dampak covid masih ada)** dan realisasi investasi tahun 2022 : 2022 : Rp. 5.124.140.000.000 Rata-rata peningkatan atau penambahan nilai realisasi investasi di Provinsi NTT periode tahun 2018 – 2022 mencapai **7,6%**. Realisasi investasi Tahun 2023 (s/d Triwulan III) adalah Rp. 4.313.900.000.000 (81,24%) **dari target Nasional Rp. 5.310.000.000.000, yang terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.682.000.000.000 , dengan 340 proyek/kegiatan usaha dan PMDN : Rp. 1.981.900.000.000 dengan 1.507 proyek/kegiatan usaha.** Data perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2017 s/d 2023 (Data Sementara), adalah sebagaimana pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4

Data perkembangan realisasi investasi dan capaian kinerja tahun 2017 – 2023 (Data Sementara) di Provinsi NTT

Tahun	PMA & PMDN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Peningkatannya (%)
2017	PMA	1.890.000.000.000	963.456.859.368	50,98	
	PMDN	1.890.000.000.000	3.487.767.704.061,49	184,54	
	Jumlah	3.780.000.000.000	4.451.224.563.429,49	117,76	41,09
2018	PMA	2.875.000.000.000	1.975.537.295.683,25	68,71	
	PMDN	2.875.000.000.000	4.115.576.708.021,16	143,15	
	Jumlah	5.750.000.000.000	6.091.114.003.704,41	105,93	36,84
2019	PMA	2.570.000.000.000	3.112.936.086.170	88,79	
	PMDN	2.570.000.000.000	4.119.056.530.702	109,30	
	Jumlah	5.140.000.000.000	7.231.992.616.871,30	140,70	18,73
2020	PMA	2.000.000.000.000	381.482.906.001	19,07	
	PMDN	2.000.000.000.000	3.910.571.670.659	195,53	
		4.000.000.000.000	4.292.054.576.669,89	107,30	(40,65)
2021	PMA	2.500.000.000.000	1.533.881.741.924	61,35	
	PMDN	2.500.000.000.000	4.215.286.509.072	168,61	
		5.000.000.000.000	5.749.168.250.996	114,98	33,94

2022	PMA	2.529.634.030.438	1.053.290.000.000	41,64	
	PMDN	3.794.451.045.657	4.070.850.000.000	107,28	
		6.324.085.076.095	5.124.140.000.000	52,25	(42,53)
2023	PMA	2.124.000.000.000	1.682.000.000.000	79,19	
	PMDN	3.186.000.000.000	2.631.900.000.000	82,61	
		5.310.000.000.000	4.313.900.000.000	81,24	(15,26)

Sumber : LKPM Online dan Hasil Olahan (Tahun 2023-Data Sementara)

Realisasi investasi Tahun 2020 sebesar Rp. 4.142.755.102.963 dengan rincian realisasi investasi PMA : Rp. 336.199.061.818 dan realisasi investasi PMDN : Rp. 3.806.556.041.145. Realisasi investasi tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Menurun sebesar Rp. 3.089.237.513.908 atau turun 74,57%. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pandemi covid 19, sehingga banyak perusahaan yang tidak optimal beroperasi berdampak pada penurunan produksi dan memberhentikan karyawannya. Data realisasi investasi tahun 2020 merupakan data sementara, data resmi masih menunggu hasil publikasi resmi BKPM RI. Sedangkan peningkatan realisasi investasi tahun 2021 mencapai 33,94% dari tahun 2020 atau meningkat sebesar Rp. 1.457.113.674.326. Dimana realisasi investasi tahun 2020 : **Rp. 4.292.054.576.669,89** dan realisasi investasi tahun 2021 meningkat mencapai **Rp. 5.749.168.250.996**. Artinya walaupun ditengah pandemi covid 19, pelaku usaha di Provinsi NTT tetap menjalankan usahanya dengan melakukan berbagai upaya efisien baik tenaga kerja, biaya pemeliharaan dan lain-lain.

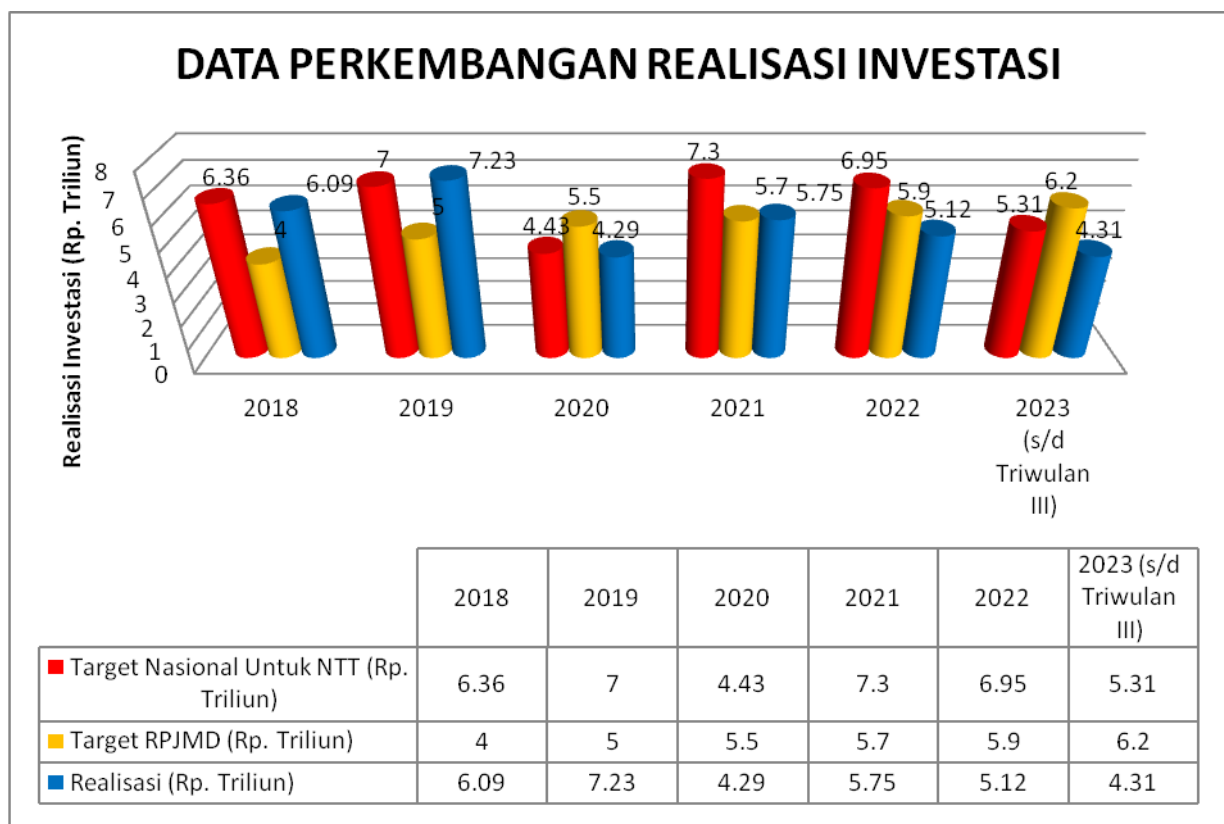
Tahun 2021 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7,3 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD/Renstra sebesar Rp. 7,59 Triliun. Namun dengan melihat kondisi pandemi covid 19 tahun 2021, maka kemudian dilakukan perhitungan ulang terhadap target realisasi investasi dan dilakukan revisi target dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2021 menjadi Rp. 5 Triliun. Realisasi investasi

Bulan Januari – Desember Tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 5.749.168.250.996 (114,98%) terhadap target RPJMD/Renstra dan 78,76% terhadap target Nasional. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.533.881.741.924 (61,35%) dengan jumlah perusahaan PMA yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sebanyak 248 perusahaan dan realisasi investasi PMDN : Rp. 4.215.286.509.072 (168,61%) dengan jumlah perusahaan PMDN yang menyampaikan LKPM sebanyak 585 perusahaan.

Tahun 2022 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 6,95 Triliun, sedangkan target sesuai RPJMD Provinsi NTT sebesar Rp. 5,9 Triliun dan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PD) Perangkat Daerah ditetapkan Rp. 6,32 Triliun. Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM RI (Rapat Koordinasi Teknis) target realisasi investasi daerah sama dengan target realisasi investasi secara nasional hasil rapat koordinasi dengan lakukan perhitungan ulang terhadap target realisasi yang ditetapkan secara Nasional untuk masing-masing Provinsi. Sehingga dalam dokumen Perjanjian Kinerja perubahan disesuaikan target realisasi investasinya menjadi Rp. 6,95 Triliun. Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online yang dilaporkan oleh pelaku usaha secara berkala (triwulanan dan semesteran), dan dipublikasi resmi oleh Kementerian Investasi / BKPM Republik Indonesia, Realisasi investasi Bulan Januari – Desember Tahun 2022 sebesar Rp. sebesar Rp. 5.124.140.000.000 (73,73%) dari 848 proyek atau jenis kegiatan usaha investasi yang tersebar di Kota Kupang dan 21 Kabupaten di Provinsi NTT dari 607 perusahaan PMA dan PMDN (PMA : 136 dan PMDN : 472). Realisasi investasi ini terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.053.290.000.000 (20,56%) dari 594 proyek / jenis kegiatan usaha (136 perusahaan) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 4.070.850.000.000 (79,47%) dari 1.747 proyek / jenis kegiatan usaha (472 perusahaan). Realisasi investasi Tahun 2023 (s/d Triwulan III) adalah Rp.

4.313.900.000.000 (81,24%) dari target Nasional Rp. 5.310.000.000.000, yang terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.682.000.000.000 dari 431 perusahaan yang menyampaikan LKPM , dengan 340 proyek/kegiatan usaha dan PMDN : Rp. 1.981.900.000.000 dari 1.044 perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan 1.507 proyek/kegiatan usaha Data perkembangan realisasi investasi tahun 2017 – 2023 (Data Sementara) di Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Gambar 6 berikut ini.

Gambar 6
Target dan Realisasi Investasi Tahun 2018 – 2023 (Data Sementara)



Sedangkan target dan realisasi investasi berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022, ada 4 (empat) kabupaten yang belum ada realisasi investasi dari Januari – Desember Tahun 2021, yaitu Kabupaten, Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Tengah dan Ngada, untuk data tahun 2022 belum ada data olahan untuk realisasi investasi berdasarkan kabupaten/kota sehingga belum bisa disajikan. Data target dan realisasi investasi berdasarkan Kab/Kota Tahun 2022 dan 2023 (data sementara) adalah sebagaimana pada Tabel 5 dan Tabel 6 berikut.

Tabel 5 Target dan Realisasi Investasi Masing – Masing Kabupaten / Kota se-
Provinsi NTT Tahun 2022

NO	Kabupaten/Kota	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	Kab. Manggarai Barat	1,750,000,000,000.00	606,050,831,713	34.63
2	Kota Kupang	1,200,000,000,000.00	665,632,705,027	55.47
3	Kab. Kupang	1,000,000,000,000.00	1,103,089,105,077	110.31
4	Kab. Sumba Timur	500,000,000,000.00	991,775,260,254	198.36
5	Kab. Ende	500,000,000,000.00	339,807,108,599	67.96
6	Kab. Rote Ndao	500,000,000,000.00	95,385,820,470	19.08
7	Kab. Manggarai	350,000,000,000.00	88,954,600,000	25.42
8	Kab. Sumba Barat Daya	250,000,000,000.00	102,401,881,170	40.96
9	Kab. Sumba Barat	150,000,000,000.00	14,109,280,555	9.41
10	Kab. Ngada	100,000,000,000.00	32,283,300,000	32.28
11	Kab. Timor Tengah Selatan	100,000,000,000.00	30,337,110,002	30.34
12	Kab. Manggarai Timur	100,000,000,000.00	14,905,000,000	14.91
13	Kab. Nagekeo	50,000,000,000.00	148,505,435,003	297.01
14	Kab. Sumba Tengah	50,000,000,000.00	20,184,600,000	40.37
15	Kab. Lembata	50,000,000,000.00	59,404,996,203	118.81
16	Kab. Alor	50,000,000,000.00	38,499,335,000	77.00
17	Kab. Sikka	50,000,000,000.00	24,707,220,081	49.41
18	Kab. Flores Timur	50,000,000,000.00	33,393,257,611	66.79
19	Kab. Timor Tengah Utara	50,000,000,000.00	76,468,860,000	152.94
20	Kab. Belu	50,000,000,000.00	16,174,900,000	32.35
21	Kab. Sabu Raijua	25,000,000,000.00	1,097,200,000	4.39
22	Kab. Malaka	25,000,000,000.00	8,296,600,000	33.19
Total		6,950,000,000,000.00	4,511,464,406,765	64.91

Tabel 6 Data Target dan Realisasi Investasi Masing-Masing
Kabupaten/Kota Tahun 2023 (Data Sementara).

Kabupaten/Kota	Target Tahun 2023	Realisasi Investasi (Rp.) Menurut	TKI
----------------	-------------------	-----------------------------------	-----

		Urutan Terbesar)	
Kota Kupang	1,200,000,000,000	1,226,130,167,000	966
Kabupaten Manggarai Barat	1,200,000,000,000	1,193,962,136,000	1002
Kabupaten Ende	150,000,000,000	477,019,108,100	373
Kabupaten Sumba Timur	100.000.000.000	476,516,121,800	921
Kabupaten Kupang	1.000.000.000.000	457,849,277,100	41
Kabupaten Sumba Barat	100.000.000.000	83,400,497,030	283
Kabupaten Rote Ndao	150.000.000.000	74,599,752,610	103
Kabupaten Sumba Barat Daya	80.000.000.000	71,084,791,950	697
Kabupaten Manggarai	50.000.000.000	56,918,100,000	116
Kabupaten Belu	150.000.000.000	38,269,400,000	190
Kabupaten Timor Tengah Utara	175.000.000.000	33,201,900,000	29
Kabupaten Ngada	100.000.000.000	21,722,771,960	37
Kabupaten Timor Tengah Selatan	50.000.000.000	21,327,099,300	92
Kabupaten Sikka	75.000.000.000	18,156,699,970	284
Kabupaten Alor	200.000.000.000	18,086,344,160	23
Kabupaten Malaka	100.000.000.000	13,847,800,000	0
Kabupaten Sabu Raijua	10.000.000.000	7,228,700,000	0
Kabupaten Flores Timur	50.000.000.000	6,536,136,625	22
Kabupaten Lembata	120.000.000.000	6,102,437,113	54
Kabupaten Manggarai Timur	50.000.000.000	5,958,397,263	2
Kabupaten Nagekeo	50.000.000.000	4,801,115,187	7
Kabupaten Sumba Tengah	50.000.000.000	1,021,198,897	0
TOTAL NTT	5.310.000.000.000	4.310.900.000.000	5.242

Catatan : Realisasi Investasi Tahun 2023 – Data Sementara.

b. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan Di Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

Dari aspek pelayanan perizinan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rata-rata peningkatan realisasi penerbitan izin dari tahun 2018 – 2022 adalah 3,84 %. Sesuai amanat PP Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mengkategorikan semua jenis kegiatan usaha dalam 4 (empat) kelompok, yaitu : kegiatan usaha beresiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi

dan kegiatan usaha beresiko tinggi). Untuk yang beresiko rendah (cukup dengan **Nomor Induk Berusaha/NIB**), resiko menengah rendah (**NIB & Sertifikat Standar/SS berupa pernyataan mandiri**), resiko menengah tinggi (NIB & Sertifikat Standar/SS yang diverifikasi) dan usaha yang resiko tinggi (**NIB & Izin**). Dari aspek moda usaha, yaitu Usaha Mikro (di bawah Rp. 1 Miliard), Usaha Kecil (di atas Rp. 1 M - 5 M) , Usaha Menengah (Rp. 5 M – 10 M) dan Usaha Besar (di atas R. 10 Miliard).

Untuk implementasinya Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Dalam Pergub Nomor 127 Tahun 2022, jenis perizinan berusaha dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- A. Perizinan Berusaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), ada 11 Sektor dan 759 jenis usaha yang terdiri dari ber KBLI : 744 jenis usaha dan PB-UMKU : ada 15 jenis usaha ;
- B. Perizinan Berusaha Non KBLI, ada 8 Sektor dan 24 jenis usaha;
- C. Perizinan Non Berusaha dan Non KBLI : ada 4 Sektor dan 8 jenis usaha ;
- D. Non Perizinan : ada 8 Sektor dan 24 jenis usaha.

Untuk proses pelayanan perizinan menggunakan 2 (system), yaitu pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko melalui **System Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA)** dan non elektronik /manual lebih banyak izin penelitian dan yang non perizinan.

Pada tahun 2022 dilakukan revisi terhadap Pergub Nomor 37 Tahun 2021 dengan Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, dimana semua jenis perizinan di

kelompokan dalam 4 (empat) kategori sesuai tingkatan resiko pelaksanaan kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha beresiko rendah, menengah rendah, resiko menengah rendah dan kegiatan usaha beresiko tinggi (amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko). Ada 774 jenis perizinan dan 24 jenis non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTP Provinsi NTT. Data perizinan berusaha menurut sektor Tahun 2023 di Provinsi NTT sebagaimana pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 Data Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Provinsi NTT

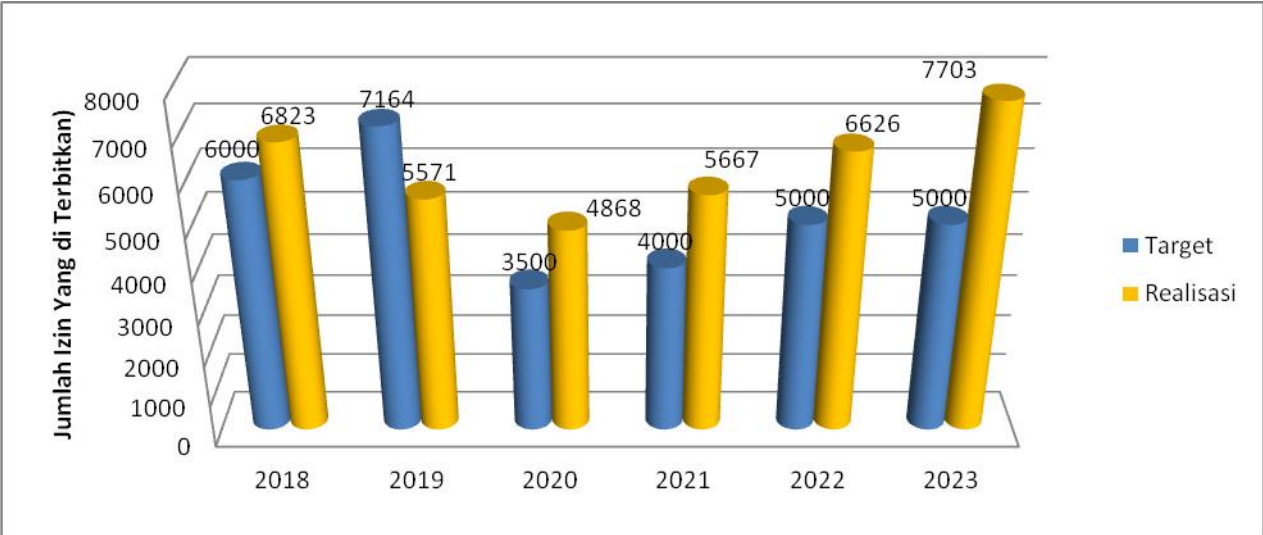
No.	Sektor	Jumlah Izin
A.	Perizinan Berusaha Sesuai KBLI & PB-UMKU	759 Jenis Perizinan
1.	Sektor Kesehatan	9 (sembilan) Jenis izin
2.	Sektor Perhubungan	30 (tiga puluh jenis perizinan
3.	Sektor Pertanian	24 (dua puluh tiga) jenis perizinan
4.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31 (tiga puluh satu) jenis perizinan
5.	Sektor Kelautan dan Perikanan	77 (tujuh puluh tiga) jenis perizinan
6.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	43 (empat puluh tiga) jenis perizinan
7.	Sektor Pariwisata	24 (dua puluh empat) jenis perizinan
8.	Sektor Perdagangan	1 (Satu) jenis perizinan
9.	Sektor Ketenagakerjaan	2 (dua) jenis perizinan
10.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2 (dua) jenis perizinan
11.	Sektor Perindustrian	513 (lima ratus tiga belas) jenis perizinan
B.	Perizinan Berusaha Non KBLI	24 Jenis Perizinan
1.	Sektor Sosial	1 (Satu) jenis perizinan
2.	Sektor Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 (Satu) jenis perizinan
3.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) jenis perizinan
4.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 (satu) jenis perizinan
5.	Sektor Peternakan	8 (delapan) jenis perizinan

6.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 (empat) jenis perizinan
7.	Sektor Perdagangan	1 (satu) jenis perizinan
8.	Sektor ESDM	6 (enam) jenis perizinan
C.	Perizinan Non Berusaha Non KBLI	8 Jenis Perizinan
1.	Sosial	2 (dua) jenis perizinan
2.	Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) jenis perizinan
3.	Peternakan	1 (satu) jenis perizinan
4.	Kesbangpol	3 (tiga) jenis perizinan
D.	Non Perizinan	24 Jenis Perizinan
1.	Sektor Kesehatan	2 (dua) jenis non perizinan
2.	Sektor Perhubungan	3 (tiga) jenis non perizinan
3.	Sektor Ketenagakerjaan	2 (dua) jenis non perizinan
4.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1 (satu) jenis non perizinan
5.	Sektor Peternakan	3 (tiga) jenis non perizinan
6.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9 (sembilan) jenis non perizinan
7.	Sektor Perdagangan	2 (dua) jenis non perizinan
8.	Sektor Kesbangpol	2 (dua) jenis non perizinan
	Total	798 Jenis Perizinan & Non Perizinan

Perizinan yang diterbitkan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rata-rata peningkatan realisasi penerbitan izin dari tahun 2020 – 2022 adalah 6,91%. Secara tren realisasi penerbitan izin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2020 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 3.500 izin realisasi sebanyak 4.868 izin yang diterbitkan atau 139,09% dan tahun 2021 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan mencapai 5.667 izin (113,34%) dan tahun 2022 target jumlah izin yang diterbitkan 5.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan s/d Bulan Desember mencapai 6.626 izin atau 132,52%, melampaui target. Pada tahun 2023 jumlah izin yang diterbitkan secara melalui front office s/d 31 Desember 2023 sebanyak 7.703 izin (154,06%), dari target tahun 2023 sebanyak 5.000 izin yang diterbitkan. Capaiannya

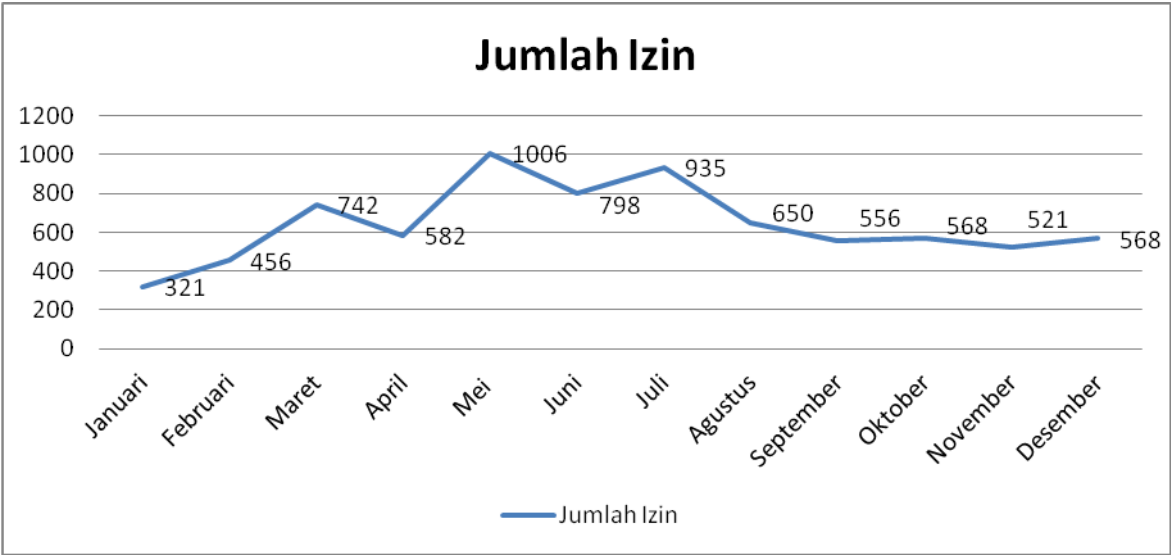
154,06 %, Rata –rata 1 bulan ± 642 izin yang diterbitkan, rata-rata per hari (22 hari kerja) ± 29 izin yang diterbitkan. Data capaian kinerja penerbitan izin tahun 2018 – 2023, adalah sebagaimana pada gambar 7 berikut.

Gambar 7 Data Perkembangan Jumlah Perizinan Yang diterbitkan Melalui Front Office DPMPTSP Tahun 2018 – 2023



Jumlah izin yang diterbitkan setiap bulan melalui front office DPMPTSP Provinsi NTT, untuk tahun 2023, adalah sebagaimana pada gambar 3.4 berikut.

Gambar 3.4. Jumlah Izin Yang Diterbitkan per Bulan Tahun 2023



Tabel 8

Data Perkembangan Penerbitan Izin Berdasarkan Bidang Tahun 2018-2023 di Provinsi NTT (Penerbitan Izin Melalui Front Office DPMPTSP)

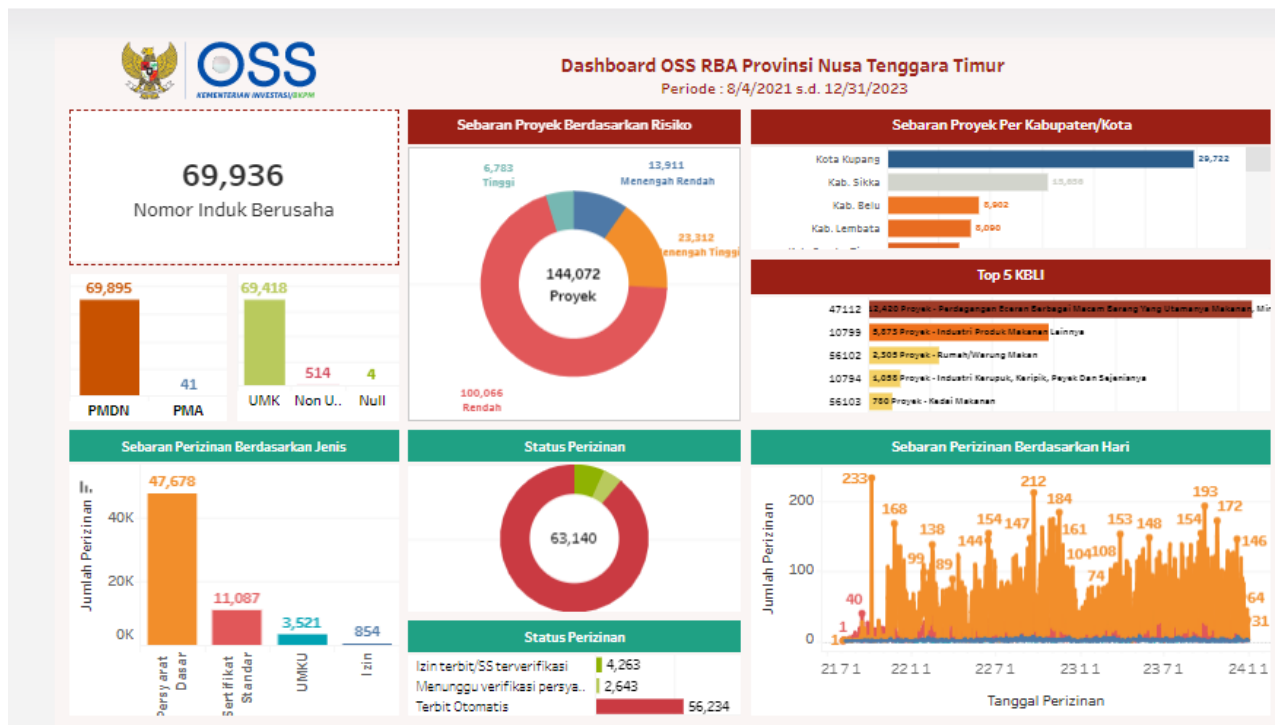
NO.	BIDANG PERIZINAN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	KESBANGPOL	4.729	3.806	3.227	3.974	4.840	5.323
2.	PETERNAKAN	870	770	572	780	833	1.325
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	840	653	678	436	581	726
4.	PERTANIAN & PERKEBUNAN	4	9	3	29	10	15
5.	KESEHATAN	18	10	13	17	4	-
6.	TENAGA KERJA & KOPERASI	73	42	17	5	21	9
7.	PERHUBUNGAN	62	73	93	101	80	105
8.	PERINDAG	6	4	4	1	14	5
9.	PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
10.	PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-	-	2	-
11.	KEHUTANAN/HUTLH	60	33	69	72	49	54
	LINGKUNGAN HIDUP	34	14	-	-	-	-
12.	SOSIAL	6	1	4	-	8	4
13.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	118	156	154	41	80	26
14.	PENANAMAN MODAL	3	-		-	-	-
15.	KEBUDAYAAN/DIKBUD	-	-	94	206	104	111
	Jumlah	6.823	5.571	4.868	5.667	6.626	7.703

Berdasarkan data pada tabel 3.8 di atas, Berdasarkan data yang ada, untuk sektor unggulan yang dominan masyarakat pelaku usaha sering mengurus izin (melalui front office DMPTSP Provinsi adalah ada 8 (delapan) bidang, yaitu :Bidang Peternakan (Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan Ke Wilayah Provinsi (Ternak Besar);, Kelautan dan perikanan (Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tangkap di atas 10 sampai dengan 30 GT & Izin usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan lintas daerah kabupaten /kota dalam satu daerah provinsi); Perhubungan (Tronton, Izin Trayek), Dikbud (Izin Oeperasional Sekolah), Lingkungan Hidup, ESDM, dan Bidang Pertanian. Ada beberapa bidang belum ada perkembangan yang cukup signifikan, seperti di Bidang Pariwisata (banyak kewenangan kabupaten/kota, pemerintah daerah terus mendorong peran serta swasta dalam upaya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proses penerbitan izin yang dilakukan secara online dan terintegrasi dari pusat sampai ke daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Sistem Pelayanan **Online Single Submission (OSS)** Risk Based Approach (RBA). Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sertifikat Standar (SS) adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelayanan kegiatan usaha. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pelaksanaan penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) – Risk Based Approach (RBA), di Lounching sejak tanggal 4 Agustus 2021, dari OSS Versi 1.1, dan digunakan oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam hal ini oleh Perangkat Daerah DPMPSTSP yang ada. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT Tahun 2021 sebanyak ± 5.234 NIB, terdiri dari PMA : 1 NIB, PMDN : 5.233 NIB (ada 5.084 UMKM dan 150 Non UMKM). Pada tahun 2022 jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT dari Bulan Januari – 31 Desember Tahun 2022 sebanyak 22.683 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NTT. Terdiri dari PMA : 13 (tiga belas) NIB; PMDN : 22.670 NIB (ada 22.433 UMK dan ada 250 Non UMK). **Tahun 2023 (Januari – Desember 2023) sebanyak 42.042 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NTT. Terdiri dari PMA : 25 (dua puluh lima)**

NIB; PMDN : 42.017 NIB (ada 41.923 UMK), dan Non UMK ada 115. Jadi total keseluruhan NIB yang terbitkan sejak OSS RBA diimplementasikan tanggal 4 Agustus 2021 s/d 31 Desember 2023 : ada 69.936 NIB, yang terdiri dari PMA : ada 41 NIB, dan PMDN ada 69.895 NIB. Dari 69.895 NIB tersebut ada 69.418 NIB yang merupakan usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non UMK/usaha menengah dan besar hanya 490 NIB. Artinya dominan usaha yang dilakukan dari sektor UMK yang menggerakkan perekonomian di Provinsi NTT yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Tahun 2023, Sertifikat Standard yang diterbitkan ada 11.087 yang diterbitkan, persyaratan dasar ada 47.678 yang diterbitkan, dokumen izin ada 854 yang diterbitkan dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) ada 3.521 yang diterbitkan dan terbit secara otomatis melalui sistem sebanyak 56.234. Sebaran proyek atau kegiatan usaha investasi berdasarkan tingkat resiko, yaitu resiko rendah ada 100.066 proyek/kegiatan investasi ; resiko menengah rendah ada 13.911 proyek/kegiatan usaha; resiko menengah tinggi ada 23.312 proyek/kegiatan usaha dan resiko tinggi ada 6.783 proyek/kegiatan usaha. Data realtime penerbitan dokumen NIB, Sertifikat Standard dan Dokumen Izin melalui Sistem OSS – RBA di Provinsi NTT Tahun 2021 - 2023 (s/d 31 Desember), yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Tabel dan Gambar 9 berikut ini.



Tabel 9 : Data Realtime Jumlah Izin Yang Diterbitkan Melalui System Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) Tahun 2021 – 2023 (31 Desember) di Provinsi NTT

Tahun	Nomor Induk Berusaha (NIB)		Jumlah	UMK	Non UMK	Sertifikat Standar	Persyaratan Dasar	UMKU	Izin
	PMA	PMDN							
2021	3	5.233	5.234	5.084	150	264	187	3	7
2022	13	22.670	22.683	22.433	250	1.670	2.408	165	197
2023	25	42.017	42.042	41.923	115	4.909	22.878	2.043	412
TOTAL	41	69.895	69.936	69.418	514	11.087	47.678	3.521	854

Capaian Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan, dengan metode yaitu secara online melalui HP Android dengan menscan barcode yang ada serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) aspek, yaitu

persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan.

Hasil survey ini dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil survey dan penilaian langsung masyarakat, terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan khusus untuk tahun 2023 adalah : Hasil Survey IKM TW I : 91,25; IKM TW II : 91,50 TW III : 92,1, dan hasil survey triwulan IV : 95 (sangat memuaskan), jadi capaian kinerjanya : 102,15%, di atas target yang ditetapkan, artinya senantiasa dilakukan pembenahan dan perbaikan pelaksanaan pelayanan. Jadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di DPMPSTSP Provinsi NTT tahun 2018 – 2023 sebagaimana pada tabel 10 berikut.

Tabel 10 Data Perkembangan Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Tahun 2018 – 2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2018	90	85,15	94,61
2.	2019	95	90,93	95,71
3.	2020	95	87,53	92,13
4.	2021	95	88,96	93,64
5.	2022	95	93	97,89
6.	2023	93	95	102,15

C. Permasalahan dan Hambatan Investasi

- Ketersediaan lahan yang masih terbatas untuk kegiatan investasi dan adanya sengketa/gugatan lahan oleh masyarakat terhadap perusahaan yang sudah beroperasi ;
- Deregulasi kebijakan kemudahan berusaha dan perizinan berusaha, perda nomor 7 tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan dengan adanya

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan turunannya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sehingga perlu direvisi.

- Masih terdapat pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha, (NIB) namun belum memenuhi komitmen atau persyaratan dasar, seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); persetujuan lingkungan (Amdal/UPL-UPL/SPPL ; Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan belum melaporkan kegiatan penanaman modal secara berkala (triwulanan untuk yang sedang konstruksi dan semesteran untuk sudah beroperasi/berproduksi);
- Masih adanya kesan masyarakat dan pelaku usaha terkait lambatnya proses pelayanan perizinan di kabupaten/kota, untuk hal ini perlu mengoptimalkan peran dan tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Tingkat Kabupaten/Kota (mengoptimalkan peran Kepolisian dan Kejaksaan yang ada dalam Satgas);
- Masih ada sejumlah jenis perizinan yang proses penerbitan dokumen perizinan masih secara manual melalui Front Office pada DPMPSTSP Provinsi NTT ;
- Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang memadai (terutama di beberapa kabupaten) sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan, untuk itu perlu dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
- Masih terbatasnya pengetahuan para tenaga operator (Investor) dalam pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala Triwulanan dan Semesteran dengan Sistem LKPM Online.

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum melakukan penyesuaian Peraturan Bupati/Walikota terkait Pendeleasian Kewenangan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 beserta lampirannya sehingga SOP pelayanan perizinan juga belum dilakukan penyesuaian sesuai regulasi yang terbaru.

D. Upaya Yang Dilakukan

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk percepatan pelaksanaan berusaha penanaman modal dan perizinan berusaha, adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan kemudahan-kemudahan kepada para calon investor untuk berinvestasi di Provinsi NTT dengan tidak memungut biaya penerbitan dokumen izin atau gratis ;
- 2) Menerapkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara *Online* (LKPM *Online*) ;
- 3) Menerapkan Pelayanan Jemput Bola – Penerbitan Izin Langsung (SiJempol dan SiPicel) di Lokasi (Proses Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin Langsung kepada masyarakat di Beberapa Kabupaten di NTT (izin yang menjadi kewenangan provinsi) sesuai anggaran yang ada ;
- 4) Inovasi Layanan Membuka *Service Point* / Gerai Layanan pelayanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) secara gratis tanpa pungut biaya yang dilakukan di Kantor DPMPTSP Provinsi NTT dan di lokasi-lokasi yang akan ditentukan, seperti *Mall Lippo Plaza Kupang*.
- 5) Untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat telah menerapkan tanda tangan secara elektronik untuk dokumen perizinan;
- 6) Melaksanakan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

- 7) Membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi di NTT dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 227/KEP/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Nusa Tenggara Timur ;
- 8) Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa instansi di antaranya : KPP Pratama Kupang, PT. Jasa Raharja, PT. Mice Indoensia (Pembuatan Buku Potensi & Peluang Investasi NTT) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Peningkatan Peran UMKM dalam penyediaan produk-produk dalam negeri), Dekranasda dan Diskopnakertrans (fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha / NIB untuk UMKM) dan PKS dengan PT. Grab Indonesia (Bulan Oktober 2023) untuk pengantaran dokumen izin sistem COD (inovasi Grab Pisel/pengantaran izin ke pemohon/pelaku usaha).
- 9) Mendukung pelaksanaan Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi dan terpusat di Kab/Kota, yang sudah Lanching MPP di Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Manggarai Timur ;
- 10) Memfasilitasi/mendampingi pelaku usaha dalam penyelesaian masalah terkait pemenuhan persyaratan perizinan, yakni Kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Lingkungan ;
- 11) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota , regulasi terkait pajak dan retribusi daerah serta pengawasan perusahaan PMA dan PMDN .